



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

REFORMASI KEBIJAKAN ENERGI UNTUK MENCAPAI *NET ZERO EMISSIONS*

Niken Paramita Purwanto

Analisis Legislatif Ahli Muda

niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Cadangan minyak bumi Indonesia terus menipis dan hanya akan dapat bertahan sampai sembilan tahun ke depan. Sementara itu, emisi karbon yang berlebihan akibat penggunaan energi fosil menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kondisi ini menjadi momentum untuk beralih ke energi baru dan energi terbarukan (EBET). Beberapa kebijakan di sektor energi perlu direformasi dalam upaya mempercepat transisi energi. Proses transisi energi memang tidak mudah dilakukan, terlebih saat ini biaya produksi EBET jauh lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil. Selain itu, masih banyaknya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang terhubung dengan industri menjadikan Indonesia masih sulit lepas dari energi fosil.

Pengembangan EBET selama ini memang berjalan lambat karena biaya investasi yang masih cukup tinggi, namun pengembangan EBET merupakan bentuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu, reformasi kebijakan energi untuk memudahkan pengembangan EBET sangat perlu dilakukan. Bauran EBET per Juni tahun 2022 baru mencapai 12,8% dari target 23% pada tahun 2025. Saat ini 89% konsumsi energi masih berasal dari energi fosil sehingga diperlukan jembatan dalam proses transisi energi, seperti pemanfaatan gas bumi yang lebih bersih dibandingkan energi fosil lainnya. Dalam *road map Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat yang telah disusun pemerintah, ditargetkan ada penambahan pembangkit EBET hingga 700 gigawatt (GW) yang berasal dari solar, hidro, biomassa, angin, laut, panas bumi, hidrogen, dan nuklir. Sehingga perlu ada langkah konkret untuk merealisasikan *road map* NZE tersebut.

Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan cadangan minyak bumi Indonesia saat ini tinggal 4,2 miliar barel dan tanpa adanya penemuan cadangan baru maka akan segera habis. Momentum kondisi berkurangnya cadangan minyak bumi ini bisa digunakan pemerintah untuk melakukan langkah konkret beralih ke EBET. Pemerintah tidak perlu meneruskan rencana pembangunan kilang baru atau merevitalisasi kilang lama demi pemenuhan BBM di dalam negeri. Dengan memiliki potensi EBET yang melimpah hingga 3.000 GW, sebaiknya pemerintah mengoptimalkan pengembangan EBET agar tidak menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih mahal lagi jika proyek EBET dikerjakan bersamaan dengan rencana pembangunan atau revitalisasi kilang. Dengan adanya percepatan pengembangan EBET melalui fondasi kebijakan yang kuat maka transisi energi bersih menjadi investasi bersama. Pemerintah diharapkan dapat mengelola dengan baik potensi EBET dalam upaya mencapai NZE.

Dalam jangka pendek, penggunaan gas bumi merupakan strategi penting dalam transisi energi. Untuk jangka panjang, PT PLN yang aktif dalam proses transisi energi akan fokus pada pengembangan energi terbarukan skala besar yang dikombinasikan dengan penyimpanan energi dan interkoneksi. Saat ini PT PLN berhasil menghapus 13 GW pembangkit listrik batu bara dalam fase perencanaan. Artinya adalah menghindari CO2 emisi sebesar 1,8 miliar ton

selama 25 tahun. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) juga bisa menjadi opsi penting dalam pengembangan EBET di Tanah Air. Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Indonesia mempunyai bahan baku nuklir yang besar, yakni dari sumber daya uranium sebesar 81.090 ton dan torium sebanyak 140.411 ton. Satu ton torium sama dengan 1.000 megawatt (MW) selama setahun, sedangkan 1.000 MW di PLTU Paiton membutuhkan 3,5 juta ton batu bara. PLTN merupakan pembangkit yang bersih dan murah dari sisi harga, di mana harga listrik PLTN sekitar US\$5-10 sen per kilowatt *hour* (kWh). Aspek keselamatan juga diklaim terjaga karena sudah berteknologi canggih. Namun, pembangunan PLTN masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat dan sementara ini masih menjadi pilihan terakhir pemerintah.

Atensi DPR

Cadangan minyak bumi yang menipis dan ancaman perubahan iklim akibat penggunaan energi fosil perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan inovasi, serta industri. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan di sektor energi dalam upaya percepatan pengembangan EBET di tanah air sebagai salah satu langkah konkret pencapaian target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat. Selanjutnya Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk bersama-sama menyegerakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai landasan utama percepatan pengembangan EBET.

Sumber

Media Indonesia, 21 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022